

II. LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

2.1.1 Profil Perusahaan

a. Sejarah Perusahaan

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur.

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.

Tatkala Banten dibawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa (1651-1683) Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat

menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatra dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji disertai tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota kesultanan Banten.

Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan VOC, oleh karenanya VOC selalu berusaha untuk menguasai kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 April 1682 Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten.

Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung.

Pada tanggal 29 Agustus 1682 iring-iringan armada VOC dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Vander Schuur dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji dan

ia mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Vander Schuur yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicarinya. Agaknya perdagangan langsung antara VOC dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan, karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni, tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh.

Sementara itu timbul keragu-raguan dari VOC apakah benar Lampung berada dibawah Kekuasaan Sultan Banten, kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak.

Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut "Jenang" atau kadangkadang disebut Gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi (lada).

Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpecah-pecah pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut "Adipati" secara hirarkis tidak berada dibawah koordinasi penguasaan Jenang Gubernur. Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada, dengan demikian jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Selanjutnya pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811 ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah

Lampung kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung baru kemudian tahun 1829 ditunjuk Residen Belanda untuk Lampung.

Dalam pada itu sejak tahun 1817 posisi Radin Inten semakin kuat, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil di pimpin oleh Assisten Residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan bahwa :

1. Radin Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar f. 1.200 setahun.
2. Kedua saudara Radin Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar f. 600 tiap tahun.
3. Radin Inten tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada dibawah pengaruhnya.

Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Radin Inten dan ia tetap melakukan perlawananperlawanan terhadap Belanda.

Oleh karena itu pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliever untuk menangkap Radin Inten, namun dengan cerdik Radin Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Liliever dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro (1825 - 1830), maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825 Radin Inten meninggal dunia dan digantikan oleh Putranya Radin Imba Kusuma.

Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830 Belanda menyerbu Radin Imba Kusuma di daerah Semangka, kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu benteng Radin Imba Kusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834 setelah Asisten Residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka Benteng Radin Imba Kusuma berhasil dikuasai.

Radin Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Radin Imba Kusuma kemudian di buang ke Pulau Timor.

Dalam pada itu rakyat dipedalaman tetap melakukan perlawanan, "Jalan Halus" dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan Belanda di daerah Telukbetung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Radin Imba Kusuma sendiri yang bernama Radin Inten II tetap berlangsung terus, sampai akhirnya Radin Inten II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia.

Sejak itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan yaitu penanaman kaitsyuk, tembakau, kopi, karet dan kelapa sawit. Untuk

kepentingan-kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Telukbetung menuju Palembang.

Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya sebagai mana dikemukakan pada awal uraian ini pada tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.

b. Visi

Visi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yaitu "Rakyat Lampung Berjaya".

c. Misi

Untuk mewujudkan Visi "Rakyat Lampung Berjaya", dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai;
- Mewujudkan "*Good Governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
- Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel;

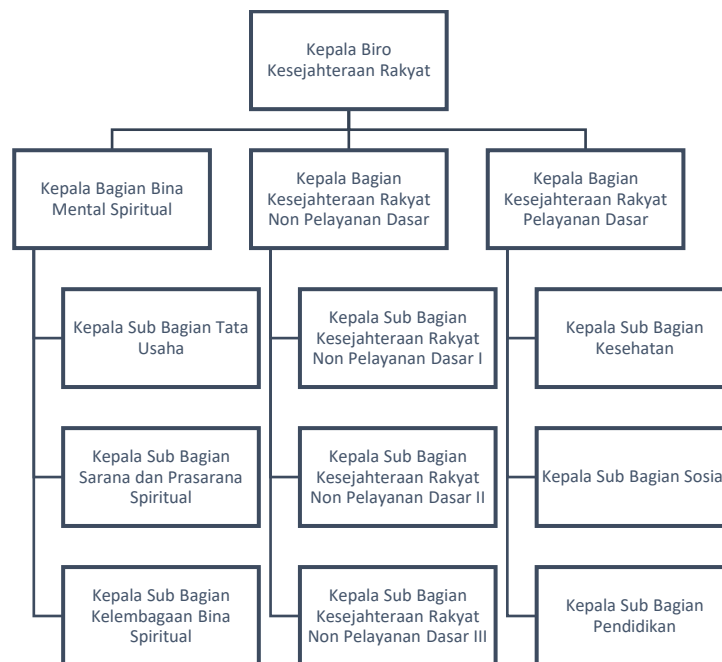
- Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
- Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;

2.1.2 Jenis Produk dan Jasa

Jenis produk dan jasa yang berada di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yaitu:

- a. Program Bantuan Dana Hibah Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah.
- b. Program Bantuan Dana Hibah Tahfidzul Qur'an (Hafidz/Hafidzah).
- c. Program Bantuan Dana Hibah Tenaga Pendidik Keagamaan Nonformal (Guru Ngaji, Marbot, dan Imam Masjid).

2.1.3 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan



2.1.4 Job Description

a. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

b. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual

Kepala Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual.

c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.

e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

f. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana spiritual.

g. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Spiritual

Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan bina spiritual.

h. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I.

i. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II.

j. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

k. Kepala Sub Bagian Kesehatan

Kepala Sub Bagian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

l. Kepala Sub Bagian Sosial

Kepala Sub Bagian Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial.

m. Kepala Sub Bagian Pendidikan

Kepala Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan.

2.1.5 Peralatan dan *Software* Pendukung

a. Peralatan Pendukung

Peralatan pendukung yang digunakan di Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di antaranya adalah mesin tik manual, PC, laptop, printer, mesin *scanner*, *paper shredder*, Wi-Fi, LAN, televisi, CCTV, pesawat telepon, brankas, kamera digital, *handy talky*, *wireless anplifier*, *speaker*, *fingerprint scanner*, dan ATK.

b. *Software* Pendukung

Software pendukung yang digunakan di Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di antaranya adalah *Microsoft Office* dan *Web Browser*.

2.1.6 Proses Produksi Perusahaan

Proses produksi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan produk yang ada adalah sebagai berikut.

- a. Pendaftar Program Bantuan Dana Hibah melengkapi persyaratan yang ada, kemudian mengajukan proposal ke Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- b. Sub Bagian Tata Usaha akan melakukan verifikasi berkas proposal yang akan diberikan ke Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
- c. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat memeriksa berkas proposal untuk menyetujui pengajuan atau tidak.
- d. Proposal yang disetujui oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat akan diproses kembali oleh Sub Bagian Tata Usaha, sedangkan proposal yang tidak disetujui akan diarsipkan.
- e. Proposal yang sudah disortir berdasarkan programnya akan diberikan ke masing-masing pengelola program.
- f. Pendaftar yang proposalnya disetujui oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat akan dihubungi oleh masing-masing pengelola program untuk membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
- g. Pendaftar mengirimkan NPHD ke masing-masing pengelola program.
- h. Masing-masing pengelola program memproses NPHD yang telah diterima untuk dilakukan validasi.
- i. Data yang dinyatakan valid akan diserahkan ke Biro Keuangan untuk ditransfer.
- j. Biro Keuangan akan memberikan Nota Dinas sebagai tanda bahwa dana sudah ditransfer dan pendaftar akan dihubungi oleh masing-masing pengelola program.
- k. Pendaftar mengirim SPJ (Surat Pertanggungjawaban) ke masing-masing pengelola program untuk diarsipkan.

2.1.7 Produk yang Sudah Dihasilkan

Produk yang sudah dihasilkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung antara lain:

- a. Program Bantuan Dana Hibah Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah.
- b. Program Bantuan Dana Hibah Tahfidzul Qur'an (Hafidz/Hafidzah).
- c. Program Bantuan Dana Hibah Tenaga Pendidik Keagamaan Nonformal (Guru Ngaji, Marbot, dan Imam Masjid).

2.2 Uraian Tentang Landasan Teori

2.2.1 Sistem Informasi

Seiring perkembangan teknologi saat ini, Sistem informasi berperan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan sebagai salah satu faktor menunjang aktivitas kegiatan operasional. Sistem informasi adalah suatu kumpulan komponen sistem, yang terdiri dari software, hardware dan brainware untuk memproses informasi menjadi sebuah hasil yang berguna untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu perusahaan (Sulistiani, Nuriansah and Wahyuni, 2022).

2.2.2 Back-End

Backend adalah tempat di mana proses pada suatu sistem informasi atau aplikasi berjalan, data dapat ditambahkan, diubah maupun dihapus. Backend biasanya mengurus segala jenis proses yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna, seperti server dan basis data. Backend dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan manajemen data pada system (Pangestika and Dirgahayu, 2017).

2.2.3 Framework CodeIgniter 4

CodeIgniter adalah merupakan sebuah aplikasi terbuka atau open source yang berpondasi dari framework PHP. CodeIgniter membantu memudahkan pengembang atau para developer untuk bisa membuat suatu aplikasi berbasis website dengan cepat dan memberikan kemudahan dibandingkan dengan membuat menggunakan koding PHP murni atau membuat dari awal pemrograman (Syalis Ibnih Melati Istini and Irsan Zuhri Harahap, 2022).

2.2.4 XAMPP

Dalam pembangunan sebuah website pastinya setiap programmer memerlukan bantuan web server untuk mengkoneksikan file-file website ke basis data. Beberapa web server yang sering digunakan diantaranya: Apache Web Server, Sun Java System Web Server, Xampp Server, Wamp server, Xitami Web Server, dan sebagainya (Saputra and Puspaningrum, 2021).

2.2.5 PHP

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Saat ini PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, sebuah kepanjangan rekursif, yakni permainan kata dimana kepanjangannya terdiri dari singkatan itu sendiri: PHP: Hypertext Preprocessor. PHP dapat digunakan dengan gratis (free) dan bersifat Open Source. PHP dirilis dalam lisensi PHP License, sedikit berbeda dengan lisensi GNU General Public License (GPL) yang biasa digunakan untuk proyek Open Source (Rina Noviana, 2022).

2.3 Analisis Proses Bisnis Yang Berjalan

Hasil analisis proses bisnis yang berjalan selama penulis melaksanakan kegiatan Kerja Praktik di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah pada proses pendataan Program Bantuan Dana Hibah.

Selama berjalannya Program Bantuan Dana Hibah, pendataan oleh masing-masing pengelola program masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara memasukkan data secara manual ke dalam Microsoft Excel. Hal tersebut tentu saja dapat terjadi kesalahan, karena data yang diinputkan oleh satu pegawai bisa saja berbeda atau tidak saling berintegrasi dengan data yang dimasukkan oleh pegawai yang lainnya. Tentunya hal ini akan menjadi masalah jika ditemukannya data sama yang lebih dari satu atau dengan kata lain data tersebut terduplikat.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis bahwa proses pendataan Program Bantuan Dana Hibah yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung masih dilakukan secara konvensional atau manual yang tentunya hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak efisien. Ditambah lagi jika terjadi kesalahan saat memasukan data, hal itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk mencari kesalahan tersebut. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Biro Kesejahteraan Rakyat untuk mempermudah serta mengefisiensikan proses pendataan Program Bantuan Dana Hibah yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Pangestika, R. and Dirgahayu, R.T. (2017) 'Pengembangan Back-end Sistem Informasi Pendataan Sekolah Desa Komunitas Pendar Foundation Yogyakarta'.

Rina Noviana (2022) 'Pembuatan Aplikasi Penjualan Berbasis Web Monja Store Menggunakan Php Dan Mysql', Jurnal Teknik dan Science, 1(2), pp. 112–124. Available at: <https://doi.org/10.56127/jts.v1i2.128>.

Saputra, A. and Puspaningrum, A.S. (2021) 'Sistem Informasi Akuntansi Hutang Menggunakan Model Web Engineering (Studi Kasus : Haanhani Gallery)', Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSl), 2(1), pp. 1–7. Available at: <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTSl>.

Sulistiani, H., Nuriansah, A. and Wahyuni, E.D. (2022) 'Pengembangan Sistem Informasi Perhitungan Upah Lembur Karyawan Berbasis Web Pada PT Sugar Labinta', Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi, 2(2), pp. 69–76. Available at: <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2015>.

Syalis Ibnih Melati Istini and Irsan Zuhri Harahap (2022) 'Implementasi Codeigniter Framework Dalam Aplikasi E-Voting Pemilihan Ketua Kelas Berbasis Website', Jurnal Teknik dan Science, 1(3), pp. 66–79. Available at: <https://doi.org/10.56127/jts.v1i3.513>.